

## Madrasah dan Mobilitas Sosial

Abdullah Idi<sup>1</sup>, Yulia Tri Samiha<sup>2</sup>, Romadhon<sup>3\*</sup>

### Abstrak

Madrasah sebagai salah satu Lembaga Pendidikan senantiasa mengalami perubahan sesaat setelah masyarakat berubah atau sebaliknya, perubahan pada sistem pendidikan seharusnya membawa perbaikan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sejarah menunjukkan kaitan dan hubungan yang erat antara pendidikan di satu pihak dan keadaan sosial kemasyarakatan dipihak lain. Dari padanya kita belajar bahwa corak masyarakat pada satu kurun waktu tertentu, sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang dilaksanakannya. Dan sebaliknya, sistem pendidikan sosial sangat dipengaruhi oleh corak dan keadaan masyarakat yang membentuknya. Kelihatannya kaitannya antar sistem pendidikan dan keadaan masyarakat yang mendukung sistem tadi merupakan suatu dilema yang cenderung bersifat statis, karena keduanya saling mempengaruhi. Hal itu disebabkan, di satu sisi pendidikan menciptakan kekuatan-kekuatan pendorong untuk mencapai kemajuan dan di sisi lain, masyarakat adalah kekuatan yang menentukan peradaban dan pengetahuan serta memberi corak dan menentukan arah perkembangan dan kemajuannya sendiri. Tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima, sehingga mendorong terjadinya mobilitas sosial naik (upward social mobility). Pendidikan yang dimaksudkan di sini ialah pendidikan formal yang berkualitas. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh ijazah yang merupakan syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Idealnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar harapannya memperoleh pekerjaan dan status yang lebih baik dalam masyarakat. Melalui Pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Sudah menjadi fitrah bagi seluruh umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui penghasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan pendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas social demi tercapainya kesejahteraan hidup.

**Kata Kunci:** madrasah; pendidikan; mobilitas sosial

#### History:

Received : 06 April 2022

Revised : 23 Juni 2022

Accepted : 23 Juni 2022

Published : 08 Agustus 2022

**Publisher:** LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

**Licensed:** This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

\*Koresponden Penulis: [romadhon@gmail.com](mailto:romadhon@gmail.com)

### Pendahuluan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan sosial keagamaan utamanya dibidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Pendidikan menciptakan kekuatan-kekuatan pendorong untuk mencapai kemajuan peradaban dan pengetahuan serta memberi corak dan menentukan arah perkembangan dan kemajuan sosial keagamaan itu sendiri. Kalau kita melihat perkembangan sosial keagamaan sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang mengalami pasang surut dalam sejarahnya, akan ditemukan kaitan dan hubungan yang erat antara pendidikan disatu pihak dan keadaan sosial kemasyarakatan dipihak lain. Dapat dikatakan bahwa corak masyarakat pada satu kurun waktu tertentu, sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang dilaksanakannya. Sebaliknya sistem pendidikan sosial itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan keadaan masyarakat ketika itu. Kelihatannya kaitannya antar sistem pendidikan dan keadaan masyarakat yang mendukung sistem tadi merupakan suatu dilemma yang cenderung bersifat statis, karena keduanya saling mempengaruhi (Syalabi, 1954: 1). Ia bisa berubah apabila salah satu dari dua unsur tersebut mengalami perubahan.

Sistem pendidikan sebagai media sosial seharusnya mengalami perubahan apabila setelah masyarakat berubah atau sebaliknya, perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan

cepat atau lambat dengan sendirinya akan membawa perubahan di dalam sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah Islam misalnya pada masa Abbasiyah (Bosworth, 2001: 27-29). Setelah keadaan politik dan keadaan masyarakat berubah maka sistem pendidikan ikut berubah pula. Pada masa-masa permulaan Abbasiyah di mana kebebasan berfikir terjamin dan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, maka timbullah majelis-majelis ilmu dan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh negeri.

Perhatian dalam bidang kajian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja dari ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, tetapi mencakup dan meyeluruh sepanjang kemampuan daya nalar para cendekiawan. Tidaklah mengherankan apabila masa itu dipandang sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam dan sebagai puncak ketinggian dari ilmu pengetahuan sosial keagamaan. Tetapi sebaliknya tatkala keadaan politik dan masyarakat sudah mulai mundur maka kebebasan berfikir dan berijtihad dibatasi, sehingga sistem pendidikan ikut serta berubah (Yunus, 1976: 62-63).

Meskipun pendidikan telah memainkan peranan yang sangat penting yang tercatat dalam sejarah perkembangan sosial keagamaan, tetapi perhatian secara khusus pada bidang ini sangat sedikit. Bahkan sebelum abad ke 20 M, literatur-literatur yang membahas secara khusus mengenai pendidikan dan pengajaran dapat dihitung dengan jari. Belum lagi pada aspek sosialnya. Fahmi (1947: 3), mengeluh dengan menyatakan "suatu hal yang mengherankan, karena pembahasan-pembahasan banyak dilakukan orang dalam berbagai segi peradaban seperti politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial tetapi pembahasan-pembahasan mengenai hubungan langsung dengan prinsip-prinsip, sistem, lembaga, metode, dan kurikulum pendidikan dan pengajaran di negeri-negeri Islam sangat kurang perhatian".

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian atas kumpulan literatur ilmiah, buku, yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis guna memperoleh hasil yang baik. Penulis menganalisa data dengan metode analisa sintesis (Sumaryono, 1999). Metode analisis sintesis adalah cara yg di pakai untuk mengkombinasikan konsep yg berlainan menjadi satu secara koheren dengan cara mengumpulkan atau mengembangkan pernyataan-pernyataan.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Pendidikan**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri profesionalisme pendidikan di sekolahnya untuk memiliki kekuatan spiritual

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Anggriawan, Syafril, Oktarina, dan Afrian, 2012).

Pendidikan dapat pula dimaknai sebagai sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat dengan metode-metode tertentu, sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Palupi & Zaldni, 2016). Pelaksanaan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat (1), yang menjelaskan bahwa jalur pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal.

Pertama, adalah pendidikan formal yang lebih dikenal sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pendidikan ini dapat dikategorikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan formal memiliki peraturan yang tegas dan mengikat, serta kurikulum yang telah dirancang yang terkadang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Tiap-tiap jenjang pada Pendidikan formal sangat berkaitan, karena siswa tidak dapat melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi apabila tidak menempuh jenjang yang lebih rendah sebelumnya. Misalnya seseorang ingin bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka dia harus bersekolah di Sekolah Dasar terlebih dahulu. ini menjadi salah satu syarat mutlak diantara berbagai syarat lainnya bagi siswa untuk dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan formal.

Kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah, atau yang berada di lingkungan masyarakat, seperti kursus, lembaga bimbingan belajar, dan balai latihan kerja. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengganti, adalah apabila seseorang tidak mampu menempuh pendidikan formal, maka dia dapat menempuh pendidikan nonformal demi kelangsungan hidupnya. Penambah, adalah apabila seseorang yang telah menempuh pendidikan formal dan ingin menambah ilmunya melalui pendidikan nonformal adalah tidak dilarang, sedangkan pelengkap berarti pendidikan sepanjang hayat berlaku bagi setiap orang untuk selalu melengkapi pendidikannya baik formal maupun nonformal. Seseorang dapat mengambil program pendidikan nonformal dalam bentuk sajian paket A (setara dengan pendidikan SD), B (setara dengan Pendidikan SLTP), dan C (setara dengan SMA/SMK). Profesionalisme Pendidikan di Sekolah

Ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (13) yang menyatakan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan informal sangat fleksibel dan tidak terikat dan terbatas waktu, dan prosesnya berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan informal tidak memiliki sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem.

Sedangkan dalam pengawasannya, pendidikan informal tidak memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan. Pengawasan pendidikan dalam keluarga sangat bergantung pada keketatan dan kedisiplinan dalam keluarga tersebut (Palupi & Zafdni, 2016). Banyaknya hal yang mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan adalah bukti bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu masalah pendidikan yang rumit ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Peran serta masyarakat diperlukan dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

### **Madrasah**

Salah satu Lembaga Pendidikan yang ada di Indonesia dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia adalah Madrasah. kata *Madrasah* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata keterangan tempat dari kata *darasa*. Secara harfiah, *madrasah* diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari kata *darasa* juga bisa diturunkan kata *midras* yang berarti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”. Kata al “*midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab taurat. Kata *madrasah* juga didapatkan dalam bahasa Hebrew dan Aramy, dari akar kata yang sama yakni *darasa* berarti “membaca dan belajar” atau tempat duduk untuk belajar. Dari kedua *bahasa* itu, kata “*madrasah*” memiliki memiliki arti yang sama: “tempat belajar”, dalam bahasa Indonesia, *madrasah* sekolah, di mana sekolah itu sendiri berasal dari bahasa asing, yakni *school* atau *scola*. (Khoiriyah dalam Idi, 2015: 161). Secara etimologis, kata merupakan *isim makan* dari kata *darasah* yang berarti “tempat duduk untuk belajar”.

Di Indonesia, istilah *madrasah* telah menyatu dengan istilah *sekolah* atau *perguruan*, khususnya yang bernuansa Islam. Dengan demikian, secara harfiah, kata *madrasah* memiliki kesamaan arti dengan sekolah agama. Setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa, diakui telah mengalami perubahan-perubahan, walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam. (Asrohah, 2001: 35) Jika pandangan diarahkan kepada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri tahun 1975, *madrasah* diartikan sebagai lembaga pendidikan yang yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum. (Mappanganro, 1996: 23). Dengan demikian, di lembaga pendidikan *madrasah*, peserta didik memperoleh pembelajaran mengenai hal ihwal dan seluk beluk agama dan keagamaan Islam. Karenanya, dalam pemakaiannya, kata *madrasah* lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa kelahiran *madrasah* di Indonesia bukan bentuk adopsi langsung terhadap praktek *madrasah* di Timur Tengah tersebut, sehingga secara otomatis, latar belakang lahirnya *madrasah* di Indonesia tetap pula dalam format yang berbeda. (Rahim, 2001: 102). Dalam perspektif historis, lembaga pendidikan Islam yang pertama didirikan di Indonesia adalah berbentuk pesantren. Karenanya, pesantren disebut sebagai bapak dari pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Baratnya, dengan karakternya yang yang *relegius oriented*, pesantren telah mampu meletakkan dasar keagamaan yang kuat. Para

santri tidak hanya dibekali pemahaman tentang ajaran Islam, tetapi juga kemampuan untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam. (Shaleh, 2000: 97).

Masuknya model pendidikan Barat pada sekolah yang didirikan oleh pemeritan colonial Belanda, membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam saat itu, yakni mengarah kepada dikhotomi ilmu agama (Islam) dan ilmu sekuler (umum). Dualisme pendidikan yang konfrontatif tersebut, telah mengilhami munculnya gerakan reformasi dalam pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pesantren. Dari situlah embrio madrasah lahir.

Pada sekitar abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem pengajaran yang berkembang di dunia Barat. Untuk menjembatani agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh, maka sistem pendidikan pesantren yang ada harus diperbaharui. Usaha pemerintah kolonial Belanda melalui politik pendidikan, mendapat respon dari umat Islam. Penyatuan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian diimbangi dengan berdirinya madrasah-madrasah, yang dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga pendidikan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan. (Djamaluddin, 1998: 57) Jadi, kelahiran madrasah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam. Atau dengan kata lain, madrasah merupakan perpaduan antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan umum yang dilakukan oleh kolonial Belanda.

### **Mobilitas Sosial**

Mobilitas sosial adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Henry Clay Smith (1968) mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial (gerakan antar individu dengan kelompoknya). (Gunawan dalam Idi, 2015: 195). Dapat dijelaskan bahwa pergerakan individu, kadang-kadang kelompok antara posisi berbeda dalam hierarki stratifikasi sosial pada masyarakat. Dalam masyarakat modern, posisi-posisi kelas dalam struktur pekerjaan menjadi perhatian utama dalam mobilitas sosial. Mobilitas sosial meliputi pergerakan meliputi pergerakan suatu kelas atau hierarki status, mobilitas ke atas (*upward mobility*) atau mobilitas ke bawah (*downdard mobility*: di mana fokus dan perhatian sosiologi adalah pada perbedaan antara kelas sosial ekonomi atau posisi status, atau hal itu mungkin merupakan lebih pada waktu singkat, sebagai contoh naik atau turun karier individu, *intragenerational mobility*. (Idi, 2015: 196).

Kata mobilitas berasal dari Bahasa latin "*mobilis*" yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Bahasa Indonesia, istilah yang sepadan dengan kata itu lazim digunakan adalah perpindahan, gerak, atau gerakan. Dengan demikian, istilah mobilitas sosial diartikan sama dengan istilah perpindahan sosial, gerak sosial, atau gerakan sosial. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain. Masyarakat dengan sistem pelapisan sosial terbuka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dibandingkan sistem pelapisan sosial tertutup yang biasanya mempunyai tingkat mobilitas rendah, seperti terlihat pada masyarakat dengan kasta.

Gunawan dalam Idi (2015: 198) menjelaskan bahwa menurut P.A Sorokin saluran mobilitas sosial terdiri dari:

- a. Angkatan bersenjata, merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan, dia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat.
- b. Lembaga keagamaan, dapat meningkatkan status sosial seseorang, misalnya seorang yang berjasa dalam perkembangan agama seperti ustadz, pendeta, dan biksu. Status sosial para penyebar ajaran agama ini akan meningkatkan status sosialnya dimasyarakat, terutama bagi komunitas penganut agama tertentu.
- c. Lembaga pendidikan, umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai *sosial elevator* (perangkat) yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Seseorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus dia memiliki pengetahuan bisnis dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha, sehingga ia berhasil menjadi pengusaha sukses, yang telah meningkatkan status sosialnya.
- d. Organisasi politik, organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat.
- e. Ekonomi, organisasi ekonomi, seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dapat meningkatkan tingkat pendapatan seorang. Semakin besar prestasinya semakin besar jabatannya. Jika jabatannya tinggi maka pendapatannya akan bertambah karena pendapatannya bertambah berakibat pada kekayaan bertambah. Juga karena kekayaannya bertambah akibatnya status sosial di masyarakat meningkat.
- f. Keahlian, seperti situs-situs karya ilmiah, orang yang rajin menulis dan menyumbangkan pengetahuan/keahliannya kepada kelompok past statusnya akan dianggap lebih tinggi dari pengguna biasa.
- g. Perkawinan, seorang bisa berubah kedudukan atau status sosialnya. Misalnya, seorang pria miskin yang menikah dengan seorang janda kaya dengan sendirinya status sosial pria itu berubah menjadi orang kaya yang dikarenakan istrinya kaya.

Adapun Faktor Pendorong Mobilitas Sosial, yaitu:

- a. Perubahan Kondisi Sosial, struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya, misalnya karena masyarakat berubah pandangan menjadi lebih terbuka. Kemajuan teknologi juga dapat membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Selain itu, perubahan stratifikasi baru.
- b. Ekspansi Teritorial (Peluasan Daerah) dan Gerak Populasi, misalnya karena perkembangan kota dan transmigrasi dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial.
- c. Komunikasi yang bebas, komunikasi yang terbatas antar anggota masyarakat akan menghambat mobilitas sosial. Sebaliknya, komunikasi yang bebas dan efektif akan memudahkan semua garis batas antar anggota sosial yang ada di masyarakat. Hal itu akan merangsang terjadinya mobilitas sosial.
- d. Pembagian kerja, besarnya kemungkinan terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Pembagian kerja berhubungan dengan spesifikasi jenis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menuntut keahlian khusus. Semakin spesifik pekerjaan yang ada di masyarakat, semakin sedikit pula

- kemungkinan individu berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Akibatnya semakin kecil kemungkinan terjadi mobilitas sosial.
- e. Tingkat fertilitas (kelahiran) yang berbeda, kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan tingkat Pendidikan yang rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah memiliki kesempatan untuk banyak bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi seperti itu mobilitas sosial dapat terjadi.
  - f. Situasi politik, kondisi politik suatu negara yang tidak stabil memungkinkan banyak penduduknya yang mengungsi atau pindah sementara ke negara lain yang lebih aman. Sebagai contoh, ketika di Indonesia terjadi Reformasi, dikhawatirkan kondisi negara kacau balau. Sebagian kecil penduduk Indonesia pindah ke daerah atau negara yang dianggap aman. Contoh lainnya ketika Israel menyerang Lebanon, sebagian besar penduduk Lebanon mengungsi ke negara tetangga untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. (Silvia, 2011)

Proses perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya tidaklah mudah. Ada beberapa faktor yang penting yang justru menghambat perpindahan tersebut.

- a. Perbedaan ras dan agama. Mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Perbedaan ras menimbulkan perbedaan status sosial. Berikut contohnya: Perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras kulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan ras berkulit hitam berada dipemerintahan sebagai penguasa. Namun, setelah politik Apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Afrika Selatan. Sistem kasta di India. Sistem tersebut tidak memungkinkan seseorang yang berasal dari kasta rendah dapat naik ke kasta yang paling tinggi. Dalam agama seseorang tidak dibenarkan dengan sebebaskan-bebasnya dan sekehendak hatinya berpindah agama untuk mencapai status tertentu.
- b. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka, dapat menghalangi mobilitas keatas. Hal itu terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan, misalnya jumlah DPR dibatasinya 500 orang.
- c. Kelas-kelas sosial, dapat menjadi subkultur tempat individu berkembang dan mengalami proses sosialisasi. Hal ini menjadi pembatas mobilitas sosial keatas. Misalnya, anak-anak dari kelas ekonomi rendah cenderung hidup dalam lingkungan, nilai dan pola pikir yang umumnya ada dalam masyarakat kelas rendah. Pengaruh sosialisasi yang kuat dari lingkungannya tersebut cenderung mengukuhkan sang anak untuk hidup dengan pola pikir masyarakat kelas rendah.
- d. Kemiskinan, dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Sebagai contoh, Ahmad memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai.
- e. Perbedaan jenis kelamin. Berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial dari pada wanita. Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa yang masih sederhana merasa

bahwa perannya hanyalah sebagai ibu rumahtangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang umum ada pada masyarakatnya. (Silvia, 2011)

### **Hubungan Madrasah dengan Mobilitas Sosial**

Hubungan antara Pendidikan (Madrasah / Sekolah) dengan mobilitas seperti yang dikemukakan Robert G. Burgess dalam Bahar bahwa sistem pendidikanlah yang menjadi mekanisme mobilitas sosial. Pendapat Ivan Reid menyatakan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial sekalipun tidak tertuju pada penempatan pekerjaan tertentu. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan. (Robinson, 1996: 54).

Pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi Pendidikan sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian (Harahap et al., 2022). Pendidikan menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang.

Mobilitas sosial dalam suatu masyarakat tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial (Arifin, 2017). Lebih lanjut, menurut Minabari (2001), peran pendidikan nasional harus dapat mewujudkan diri untuk menjadi sarana atau media mobilitas sosial sehingga harus menekankan pada pemerataan kualitas pendidikan. Pada penelitiannya, Pattinasarany (2012) menyatakan bahwa pendidikan dapat dikatakan sebagai “*elevator sosial*” yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan posisi sosial seseorang.

Ada beberapa hal dalam melihat hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial yaitu: kesempatan pendidikan yang banyak ditentukan oleh faktor-faktor tertentu antara lain kedudukan atau status sosial masyarakat. Kalangan masyarakat bawah menginginkan terjadinya perubahan atau mobilitas sosial melalui pendidikan. Selain itu juga untuk mendapatkan pekerjaan, kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, akan tetapi tidak semua orang yang berkualifikasi tinggi dalam pendidikan mendapatkan yang cocok dengan pekerjaannya. Kesempatan pekerjaan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda karena mobilitas sosial dipengaruhi adanya pendidikan, maka pendidikan menghasilkan kualifikasi yang lebih banyak. Jadi secara singkat hubungan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga apabila ingin mobilitas sosial semakin baik maka kesempatan memperoleh pendidikan semakin baik, dan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Pada zaman dahulu orang yang dapat menyelesaikan pendidikannya tingkat SD pada zaman Belanda mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapatkan kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi bila seseorang dapat meluluskan pendidikannya di MULO, AMS, atau perguruan tinggi maka makin besarlah kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. (Sutomo, 2009: 39).

Kini pendidikan SD/Madrasah Ibtidaiyah, bahkan SMU atau Madrasah Aliyah hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMU/Madrasah Aliyah, maka ijazah SMU/Madrasah Aliyah tidak ada artinya lagi dalam mencari kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan kini lulusan perguruan tinggi pun sudah bertambah sulit dalam mobilitas sosial secara vertikal, yakni untuk memperoleh



kedudukan yang lebih baik. Karena kompetisi untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dengan bekal ijazah perguruan tinggi semakin melimpah. Oleh karenanya persaingan pun juga sangat ketat. Walaupun demikian pendidikan tinggi masih sangat selektif. Tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di perguruan tinggi. Dengan menggunakan komputer untuk menilai tes seleksi masuk menjadi obyektif, artinya tidak lagi dipengaruhi oleh kedudukan orang tua atau orang yang memberikan rekomendasi. Cara itu memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak dari golongan rendah dan menengah untuk memasuki perguruan tinggi atas dasar prestasi dan kemampuannya. (Vembriarto, 1993: 102).

Di satu sisi Anderson (1961), dalam studinya menekankan bahwa hendaklah berhati-hati untuk menyimpulkan bahwa mobilitas sosial ke atas itu ditentukan oleh pendidikan formal saja. Studi-studi komparatif menunjukkan bahwa di Swedia, dan Amerika Serikat banyak terdapat diketemukan mobilitas sosial yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan sekolah. Hal itu menunjukkan bahwa intelegensi dan motivasi merupakan faktor penting pula yang mempengaruhi mobilitas sosial. Kedua faktor tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan pendidikan formal sekolah. (Robinson, 1996: 286).

Dari uraian di atas simpulkan semakin berfungsinya tingkat pendidikan, maka semakin besarlah kemungkinan untuk mobilitas sosial, terutama bagi anak-anak dari golongan rendah dan menengah. Meskipun dalam realitasnya pernyataan tersebut tidak selalu benar terutama jika pendidikan hanya sebatas tingkat madrasah aliyah saja terlebih lagi tidak memiliki keterampilan sebagai pendamping ijazah. Strategi pembaharuan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Jadi pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depan. Hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat social ekonomi seseorang digambarkan oleh Clark (dalam Mukhlis dan Muslih, 2015) sebagai berikut:

- a. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya. Tidak dapat dipungkiri, pada umumnya karyawan dengan tamatan pendidikan SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi memiliki tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pendapatannya.
- b. Tamatan sekolah dasar (atau sekolah menengah pertama) akan mendapat penghasilan maksimal pada usia sekitar 25-34 tahun; tamatan sekolah menengah atas akan mendapatkan penghasilan maksimal pada usia sekitar 35-44 tahun dan tamatan perguruan tinggi akan mendapat hasil maksimal pada usia sekitar 45-54 tahun.
- c. Tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada usia tua mendapat hasil yang lebih rendah dari hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan sekolah menengah atas pada usia tua mendapat hasil yang seimbang dengan hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan perguruan tinggi pada usia tua mendapat hasil yang lebih besar ketika mereka mulai bekerja.

Pendapat Clark tersebut senada dengan pendapat Kuznet (dalam Nuraini, 2012), yang menjelaskan bahwa distribusi pendapatan berhubungan dengan distribusi tingkat pendidikan. Pada masyarakat kelas bawah yang berpendapatan sangat rendah cenderung memiliki distribusi pendapatan yang merata karena faktor tingkat pendidikan yang sangat

rendah pula. Walau demikian tentulah dimaklumi bahwa tidak semua orang mengalami atau memiliki korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan seperti diatas, penyimpangan tentu ada sebagaimana dalam masalah sosial lainnya. Misal Profesionalisme Pendidikan di Sekolahkan saja seperti pendapat Musyarifah (2018), seorang anak yang berasal dari keluarga miskin bahkan kelompok miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus dia memiliki pengetahuan bisnis dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha, sehingga dia berhasil menjadi pengusaha sukses yang telah meningkatkan status sosialnya.

### **Kesimpulan**

Madrasah sebagai salah satu macam nama Pendidikan yang ada di Indonesia, dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan bagi mobilitas sosial.

Dalam proses perubahan pendidikan paling tidak memiliki dua peran yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Pendidikan akan berpengaruh terhadap Mobilitas Sosial dan perubahan masyarakat, dan 2) Pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat dan dapat memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi ilmu pengetahuan dan pelatihan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang realitas sosial serta cara melakukan mobilitas sosial. Mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah dapat mengakomodasi Pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia, agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

### **Referensi**

- Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur. 2001. *Ilmu Pendidikan Islam. Cet. II*; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asrohah, Harun. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam. Cet. II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu
- Djamaluddin, M. dan Ali, Abdullah. 1998. *Kapita Selekta Pendidikan Islam. Cet.I*; Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, F. M., Ulinniam, Sitinjak, L., Urath, S., & Alfiyanto, A. (2022). Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 23 Palembang. *Pendidikan Tambusai*, 06(02), 8501–8508. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3697>
- Idi, Abdullah, Safarina. 2015. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mappanganro. 1996. *Eksistensi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Ujung Pandang : CV. Berkah Utami.
- Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Nuraini, E. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila*. Unesa, 5(1), 52–67.
- Palupi, D. R., & Zatdni, G. F. (2016). *Perubahan Sosial Dan Pendidikan*. Malang.
- Pattinasarany, E. R. I. (2012). *Mobilitas Sosial Vertikal Antar Generasi: Kajian Terhadap Masyarakat Kota Di Provinsi Jawa Barat Dan Jawa Timur*. Universitas Indonesia.
- Seknun, M. Y. (2015). *Pendidikan Sebagai Media Mobilitas Sosial*. Auladuna, 2(1), 131–141.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaitun. (2015). *Sosiologi Pendidikan (Analisis Konprehensif Aspek Pendidikan dan Proses Sosial)*. Pekan baru: Kreasi Edukasi.
- Zamhari, A. (2012). *Pengaruh Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial*. *Ta'limuna*, 1(2), 127–140.